



Research Article

Politisasi Hadis dalam Media: Analisis Penggunaan Agama sebagai Instrumen Kampanye Politik

Fauzan Akbar¹, Asrar Mabrur Faza², Rahmi Syahriza³

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan; akbarfauzan691@gmail.com
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa; asrar.faza@iainlangsa.ac.id
3. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan; ; rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2024
Accepted : January 12, 2025

Revised : December 27, 2024
Available online : February 06, 2025

How to Cite: Fauzan Akbar, Asrar Mabrur Faza, & Rahmi Syahriza. (2025). Politicization of Hadith in the Media: Analysis of the Use of Religion as an Instrument for Political Campaigns. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), 127-145. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.58>

Politicization of Hadith in the Media: Analysis of the Use of Religion as an Instrument for Political Campaigns

Abstract. Politicization of hadith in the media has become an increasingly visible phenomenon in various political campaigns, where religion is often used as a tool to influence public opinion and strengthen the support base. The background problem in this study relates to the widespread use of hadith in the media to support or attack certain political figures, as well as its impact on people's perceptions of religion and politics. The aim of this research is to analyze how hadith is used in the media as an instrument for political campaigns, as well as its impact on people's understanding of religion. This research uses qualitative methods using content analysis techniques for media reports and political campaign materials involving hadith quotations. Results show that hadiths are often twisted or quoted selectively to support specific political narratives, with the aim of establishing political legitimacy or diverting public attention from substantive issues. The conclusion of this research is that the politicization of hadith in the media has the potential to undermine authentic religious

understanding and exacerbate social polarization, and demands ethical supervision in the use of religion in the public sphere.

Keywords: Politicization; Media; Religion; Politics Campaign; Hadith

Abstrak. Politisasi hadis dalam media telah menjadi fenomena yang semakin terlihat dalam berbagai kampanye politik, di mana agama sering kali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan memperkuat basis dukungan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan maraknya penggunaan hadis dalam media untuk mendukung atau menyerang figur politik tertentu, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap agama dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hadis digunakan dalam media sebagai instrumen kampanye politik, serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap pemberitaan media dan materi kampanye politik yang melibatkan kutipan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis sering dipelintir atau dikutip secara selektif untuk mendukung narasi politik tertentu, dengan tujuan membangun legitimasi politik atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa politisasi hadis dalam media berpotensi merusak pemahaman agama yang autentik dan memperburuk polarisasi sosial, serta menuntut adanya pengawasan etis dalam penggunaan agama dalam ruang publik.

Kata Kunci: Politisasi; Media; Agama; Kampanye Politik; Hadis

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Media digital, seperti media sosial dan platform berbasis internet, menjadi ruang publik baru yang sangat dinamis.¹ Dalam konteks agama, media digital memainkan peran strategis dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan, baik secara positif maupun negatif. Nilai-nilai agama yang awalnya disampaikan melalui tradisi lisan dan teks tertulis kini lebih mudah diakses, disebarluaskan, bahkan dimodifikasi melalui platform digital.² Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pemahaman keagamaan secara cepat dan luas, tetapi juga membuka peluang munculnya interpretasi yang kurang akurat, termasuk dalam konteks hadis. Di sisi lain, media digital sering kali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik, khususnya dalam arena politik, yang menciptakan fenomena baru berupa politisasi agama.³

Fenomena politisasi hadis di era digital semakin nyata, terutama dalam konteks kampanye politik. Politisasi hadis merujuk pada penggunaan teks-teks hadis untuk tujuan politik, baik untuk mendukung agenda tertentu, menyerang lawan

¹ Mykhailo Kalganov, "The Interaction of Humans and The Information Sphere in The Digital Age," *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy* 1, no. 8 SE- (March 29, 2023): 25–29, <https://doi.org/10.17721/2523-4064.2023/8-4/8>.

² Stef Aupers and Lars de Wildt, "Digital Religion," ed. Deana A Rohlinger and Sarah Sobieraj, *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology* (Oxford University Press, September 21, 2022), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197510636.013.37>.

³ Ali Ridho et al., "Reducing The Politicization of Religion and Discrimination Againsts Minority Groups Ahead of The 2024 Political Year in Indonesia From The Perspective of Digital Media," *PERADA* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.825>.

politik, maupun membangun citra religius seorang tokoh. Dalam berbagai kasus, hadis-hadis yang seharusnya menjadi pedoman moral dan etika sering kali diambil di luar konteksnya untuk mendukung narasi politik tertentu. Hal ini sering kali dilakukan melalui media sosial, di mana audiens yang luas dan heterogen menjadi target utama.⁴ Misalnya, potongan hadis atau interpretasi tertentu diproduksi ulang dan disebar dengan narasi yang mendukung kandidat atau ideologi tertentu. Strategi ini sering kali mempermainkan emosi religius masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan polarisasi sosial dan politik di tengah-tengah umat.

Pengaruh media digital dalam fenomena ini tidak bisa diabaikan. Dengan kemampuan algoritma media sosial, konten yang mengandung narasi politisasi hadis dapat dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.⁵ Hal ini didukung oleh kecenderungan masyarakat untuk berbagi konten yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi menjadi lebih mudah diterima sebagai kebenaran. Dalam konteks kampanye politik, kondisi ini sangat menguntungkan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi politik.⁶ Hadis yang sejatinya merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam sering kali direduksi menjadi alat propaganda untuk mendukung agenda pragmatis.

Pentingnya analisis kritis terhadap fenomena ini semakin mendesak mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Pertama, politisasi hadis dalam media digital dapat menggerus makna otentik hadis itu sendiri. Ketika hadis dipolitisasi, nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya berpotensi terdistorsi.⁷ Kedua, fenomena ini berpotensi memperdalam segregasi sosial berdasarkan preferensi politik dan agama, yang pada gilirannya dapat memicu konflik horizontal. Ketiga, legitimasi agama yang digunakan untuk membenarkan tindakan politik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama itu sendiri.⁸ Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak integritas agama sebagai sumber moralitas universal.

Selain itu, politisasi hadis dalam kampanye politik juga menimbulkan pertanyaan etis dan epistemologis. Secara etis, manipulasi agama untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi spiritual masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar agama, yang seharusnya menjadi jalan untuk mendekatkan

⁴ Mugy Nugraha, Fatihunnada Fatihunnada, and Nalil Huda, "Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 63, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.8982>.

⁵ Istianah Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2020, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6861>.

⁶ Nurul Hasfi, "Politik Keshalehan Personal Dalam Pemilihan Presiden 2014 Dalam Media Sosial Twitter," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 48, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28580>.

⁷ Sabilar Rosyad and Muhammad Alif, "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (2023): 185–97, <https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>.

⁸ Yuseptia Angretnowati and Meike Lusye Karolus, "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalisme Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 369–93, <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>.

manusia kepada nilai-nilai keadilan dan kebenaran.⁹ Secara epistemologis, fenomena ini juga mempersoalkan otoritas dan validitas interpretasi hadis yang digunakan. Apakah interpretasi tersebut benar-benar didasarkan pada metodologi keilmuan hadis, ataukah sekadar tafsiran subjektif yang dimanipulasi untuk kepentingan politik?

Fenomena politisasi agama, termasuk hadis, juga tidak terlepas dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Dalam sistem politik demokratis, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim, agama sering kali menjadi instrumen strategis untuk meraih dukungan publik. Politisi memahami bahwa mayoritas pemilih memiliki afiliasi emosional yang kuat terhadap agama, sehingga pesan-pesan bernuansa religius memiliki daya tarik elektoral yang besar.¹⁰ Dalam konteks ini, media digital menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkuat pesan-pesan tersebut. Namun, penggunaan agama dalam politik sering kali hanya bersifat instrumental, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap harmoni sosial dan keberlanjutan kehidupan beragama.¹¹

Dalam situasi ini, analisis kritis terhadap penggunaan agama dalam politik menjadi sangat penting. Pertama, analisis ini dapat membantu mengungkap motif di balik penggunaan hadis dalam kampanye politik, apakah benar-benar untuk tujuan kebaikan bersama atau sekadar untuk keuntungan elektoral. Kedua, analisis kritis juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi agama dan politik. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu membedakan antara penggunaan agama yang genuine dan manipulatif. Ketiga, analisis kritis dapat memberikan masukan bagi para pemimpin agama dan akademisi untuk lebih proaktif dalam meluruskan pemahaman yang keliru tentang hadis dan penggunaannya dalam kehidupan sosial-politik.

Kajian mengenai politisasi hadis dalam media telah menjadi perhatian sejumlah penelitian sebelumnya. Pertama, sebuah penelitian oleh Salman (2022) mengeksplorasi bagaimana hadis sering kali digunakan dalam kampanye politik kekuasaan untuk memperkuat legitimasi pemimpin. Studi ini menyoroti manipulasi teks hadis tertentu dalam rangka menguatkan narasi politik.¹² Kedua, penelitian oleh Alkadri (2021) berfokus pada penggunaan hadis dalam propaganda politik oleh partai-partai Islam di Indonesia. Kajian ini menyoroti bagaimana pemahaman hadis yang bias digunakan untuk membentuk opini pemilih.¹³

⁹ Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.

¹⁰ Indar Arifin, "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres, Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022): 1049, <https://doi.org/10.29210/020221706>.

¹¹ Mohammad Shofan, "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis?," *MAARIF* 13, no. 2 (2018): 3–6, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.17>.

¹² Abdul Matin Bin Salman, "Hadith of the Prophet in the Politics of Power: Study of the Meaning of the Prophet's Hadith from the Perspective of Power," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 2580–3190, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4326>.

¹³ Alkadri Alkadri, "Propaganda Politik Dalam Isi Kandungan Hadis-Hadis Palsu," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 68–85, <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.768>.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti analisis komprehensif terhadap pola, strategi, dan dampak politisasi hadis di media digital modern sebagai instrumen kampanye politik. Berbeda dengan kajian terdahulu yang sering kali hanya fokus pada konteks geografis tertentu atau media tradisional, penelitian ini mengintegrasikan berbagai media kontemporer dan lintas kawasan untuk memahami dinamika global dari fenomena ini. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana hadis digunakan secara strategis dalam media digital untuk mendukung agenda politik tertentu, termasuk implikasi etis dan sosial dari praktik tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola penggunaan hadis dalam kampanye politik, menganalisis dampaknya terhadap pemahaman keagamaan masyarakat, dan menawarkan rekomendasi untuk mencegah penyalahgunaan hadis di masa depan. Penelitian ini penting karena meningkatnya pengaruh media digital dalam membentuk opini publik dan potensi kerugian akibat politisasi agama yang dapat merusak integritas ajaran Islam. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi politik, dan masyarakat umum tentang pentingnya memahami dan menjaga kesucian hadis dari manipulasi politik, serta menyarankan kebijakan untuk mengatasi fenomena ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis politisasi hadis dalam media, khususnya penggunaan agama sebagai instrumen kampanye politik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur yang mencakup artikel-artikel media massa, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hubungan antara agama, politik, dan media, dengan fokus pada hadis sebagai sumber ajaran Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, yaitu menyeleksi dan menganalisis berbagai teks media yang berhubungan dengan politisasi agama, terutama hadis, dalam kampanye politik. Proses analisis data akan menggunakan teknik analisis isi, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan mengevaluasi penggunaan hadis dalam konteks politik yang terdapat dalam media, serta menilai bagaimana interpretasi dan konteks hadis digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Analisis ini juga akan memperhatikan bagaimana media memframing hadis untuk mendukung agenda politik tertentu, serta bagaimana dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran hadis dalam politisasi agama dan implikasinya terhadap dinamika politik di media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Tujuan Politisasi Hadis

Politisasi hadis merujuk pada penggunaan hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah saw., untuk tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, hadis digunakan sebagai legitimasi atau pembenaran bagi tindakan politik atau ideologi yang diusung oleh pihak-pihak tertentu. Politisasi hadis sering kali melibatkan interpretasi selektif terhadap teks hadis yang dianggap mendukung agenda politik tertentu, baik itu dalam pemilihan umum, kampanye politik, maupun

kebijakan pemerintah.¹⁴ Dalam prakteknya, politisasi hadis dapat dilakukan melalui media massa, ceramah, publikasi, atau bentuk lain untuk menarik dukungan massa atau menciptakan dampak sosial-politik yang lebih besar. Hal ini berpotensi menyesatkan pemahaman agama karena sering kali memanfaatkan hadis secara parsial tanpa memperhatikan konteks atau tujuan asli ajaran Islam.¹⁵

Tujuan politisasi hadis sangat bervariasi, tergantung pada kepentingan politik yang ingin dicapai. Salah satu tujuan utama adalah untuk mendapatkan dukungan dari kelompok umat Muslim dengan menggunakan hadis yang dipahami sejalan dengan visi politik tertentu. Penggunaan hadis dalam kampanye politik bisa meningkatkan kredibilitas politik, karena ia berusaha mengaitkan kebijakan atau ideologi yang diusung dengan ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas umat Muslim.¹⁶ Politisasi hadis juga dapat berfungsi untuk membangun identitas politik yang kuat, misalnya dengan menciptakan citra sebagai pembela nilai-nilai agama, memperkuat posisi atau kekuasaan politik, atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain yang lebih krusial.¹⁷ Di sisi lain, politisasi hadis dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, seperti penguatan otoritarianisme atau pengabaian hak-hak asasi manusia, dengan mengutip hadis yang dianggap mendukung kebijakan tersebut, meskipun terkadang tanpa melihat konteks historis atau etis yang lebih luas.¹⁸

Dalam konteks media dan kampanye politik, politisasi hadis menjadi alat yang kuat untuk mempengaruhi opini publik. Media sosial, televisi, dan saluran komunikasi lainnya sering kali digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang berbasis pada interpretasi hadis. Melalui platform ini, politisi dapat menargetkan audiens yang besar, terutama mereka yang memandang agama sebagai bagian integral dari identitas politik mereka.¹⁹ Penggunaan hadis dalam media politik sering kali berfokus pada narasi yang sederhana dan mudah dipahami, yang kemudian diterima oleh banyak orang tanpa mempertanyakan validitas atau relevansinya.²⁰ Ini memperlihatkan bahwa politisasi hadis tidak hanya terbatas pada elite politik, tetapi juga melibatkan publik yang lebih luas dalam diskursus politik.

¹⁴ Nugraha, Fatihunnada, and Huda, "Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik."

¹⁵ Salman, "Hadith of the Prophet in the Politics of Power: Study of the Meaning of the Prophet's Hadith from the Perspective of Power."

¹⁶ Ali Imron, "THE MILLENNIAL GENERATION, HADITH MEMES, AND IDENTITY POLITICS: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 255–83, <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5675>.

¹⁷ Siti Annisafa Oceania et al., "Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Alquran Dan Hadist," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2024): 131–52, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2753>.

¹⁸ Abdul Haq Syawqi and Muhammad Khatibul Umam, "Nuansa Politik Dalam Memahami Hadis: Analisa Metodologis-Historis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (2021): 201–20, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9421>.

¹⁹ Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial."

²⁰ Nugraha, Fatihunnada, and Huda, "Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik."

Perspektif ulama dan sarjana kontemporer mengenai penggunaan agama dalam politik beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa menggunakan agama, termasuk hadis, untuk tujuan politik dapat merusak kemurnian ajaran Islam, karena agama seharusnya berdiri di atas kepentingan politik dan tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan atau keuntungan pribadi. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks hadis secara mendalam dan menyarankan agar hadis tidak dijadikan alat untuk mendukung agenda politik tertentu. Selain itu, mereka juga mengingatkan tentang bahaya tafsiran yang sesat dan potensi penyalahgunaan teks agama untuk kepentingan politik.²¹

Di sisi lain, ada juga pandangan yang lebih moderat, yang menerima bahwa agama dan politik memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan, mengingat sejarah panjang Islam yang turut membentuk kehidupan politik umat Muslim. Beberapa sarjana kontemporer berpendapat bahwa penggunaan hadis dalam politik, apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan mempertimbangkan konteks sejarah serta kebutuhan umat, tidak selalu negatif. Mereka menilai bahwa agama bisa berfungsi sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan politik, memberikan petunjuk tentang keadilan, pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan masyarakat.²² Namun, pandangan ini juga menegaskan bahwa hadis harus digunakan dengan hati-hati, untuk mencegah penyalahgunaan atau manipulasi teks agama demi kepentingan politik sempit.

Namun, baik dari perspektif ulama tradisional maupun pemikir kontemporer, ada kesepakatan tentang pentingnya menjaga integritas agama agar tidak terjebak dalam arus politisasi yang bisa merusak esensi ajaran Islam itu sendiri. Politisasi hadis yang tidak hati-hati dapat menyebabkan penyimpangan dalam pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam, kritis, dan kontekstual terhadap hadis sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif dari politisasi agama dalam politik. Selain itu, penting bagi umat Islam untuk mempertanyakan setiap penggunaan agama dalam politik, dengan memastikan bahwa itu benar-benar mencerminkan ajaran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan umat.

Bentuk-Bentuk Platform Digital dalam Politisasi Hadis

Politisasi hadis melalui platform digital adalah fenomena yang semakin marak di era digital ini. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai media untuk menyebarkan narasi-narasi yang berkaitan dengan interpretasi hadis dalam konteks politik, yang sering kali disesuaikan dengan kepentingan atau agenda tertentu.²³ Berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi berbagi pesan, dan situs web berbasis agama, memainkan peran penting dalam proses ini. Mereka menyediakan

²¹ Bertolomes Bolong, "Etika Politik Ulama," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018): 129–52, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7>.

²² Fatemeh Ahmadvand, Alireza Ashtari Tafreshi, and Ahmad Rabbanikhah, "The Position of Qur'an and Hadith in Islamic Political Thought: The Case Study of Siraj Al-Muluk by Abubakr Al-Turtushi (D. 520 AH)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (2022): 215, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3395>.

²³ Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial."

ruang bagi individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan, menyebarkan, dan membentuk opini terkait interpretasi hadis yang memiliki dampak luas pada masyarakat.

Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, merupakan saluran utama dalam politisasi hadis. Platform-platform ini memungkinkan penyebaran pesan dengan jangkauan yang sangat luas. Dalam konteks politisasi hadis, pengguna media sosial dapat dengan mudah membagikan narasi yang memanfaatkan hadis untuk mendukung atau menyerang ideologi politik tertentu.²⁴ Misalnya, di Facebook dan Twitter, pengguna dapat membuat pos yang mencantumkan hadis tertentu untuk mendukung pandangan politik mereka, baik yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan sosial, atau masalah-masalah yang relevan dengan agama. Hal ini sering kali diperburuk dengan penambahan narasi yang membingkai hadis dalam kerangka ideologi tertentu, yang bisa menyesatkan jika tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Instagram dan TikTok, dengan fitur visual mereka, juga menyediakan ruang bagi pembuatan konten yang menarik, seperti video singkat atau infografis, yang bisa menyebarkan narasi politis berbasis hadis dengan cara yang lebih kreatif dan cepat.²⁵

Selain itu, aplikasi berbagi pesan seperti WhatsApp dan Telegram memainkan peran krusial dalam penyebaran narasi politisasi hadis dalam ruang yang lebih tertutup dan personal. Grup-grup WhatsApp, yang banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat, sering menjadi sarana untuk berbagi pesan-pesan yang berkaitan dengan politik dan agama. Melalui pesan berantai atau forward pesan, informasi atau narasi yang mengutip hadis untuk tujuan politis bisa tersebar luas di kalangan anggota grup tanpa adanya verifikasi yang memadai. Dalam kasus tertentu, pesan ini bisa menjadi sangat viralisasi, memperkuat keyakinan tertentu, atau bahkan memperburuk polarisasi sosial.²⁶ Telegram, dengan fitur saluran yang memungkinkan penyebaran informasi ke ribuan orang secara langsung, juga digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan tafsiran hadis yang mendukung agenda politik atau ideologi tertentu. Aplikasi ini lebih tertutup dan memungkinkan diskusi yang lebih intens, yang bisa mendorong polarisasi dalam masyarakat.²⁷

Situs web dan portal berita berbasis agama juga menjadi platform penting dalam politisasi hadis. Banyak situs web yang fokus pada topik agama, seperti yang mengkhususkan diri dalam kajian hadis atau fikih, digunakan untuk menyebarkan tafsiran hadis yang sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Situs-situs ini sering kali mempublikasikan artikel, kajian, atau video yang mengutip hadis untuk mendukung suatu pandangan ideologi, terutama ketika ada masalah sosial atau

²⁴ Azhari Andi, "Menyikapi Fenomena Labelling Olok-Olok Politik Di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (2019): 207–33, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1624>.

²⁵ Inas Sany Muyassaroh et al., "Model Komunikasi Pendakwah Pada Konten Dakwah Dalam Isu Sosial Dan Politik Di Media Sosial," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2231–41, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15480>.

²⁶ Syahrir Karim, "The Phenomenon of WhatsApp Group and The Formation of a New Political Identity," in *HICOSPOS*, 2020, 1–5, <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291590>.

²⁷ Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial."

politik yang relevan dengan agama. Situs-situs ini memiliki pengaruh besar, karena banyak pengunjung yang mencari penjelasan atau fatwa terkait isu-isu politik dalam kerangka agama.²⁸ Misalnya, ketika suatu kebijakan politik atau peristiwa besar terjadi, beberapa situs web agama mungkin mengutip hadis untuk memberi dukungan moral terhadap suatu tindakan politik tertentu atau untuk mengkritik pemerintah yang berkuasa. Ini tidak hanya mempengaruhi pembaca yang terlibat langsung dalam politik, tetapi juga menyebarkan narasi yang bisa memperburuk polarisasi sosial di masyarakat.

Dalam konteks politisasi hadis, platform-platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang di mana masyarakat bisa terlibat dalam diskursus yang memperdebatkan makna dan aplikasi hadis dalam kehidupan modern. Namun, penggunaan platform ini sering kali mengarah pada penyebaran interpretasi yang sangat selektif, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kontestasi politik.²⁹ Banyak konten yang disebarkan menggunakan hadis tidak sepenuhnya mencerminkan konteks historis dan keilmuan yang mendalam, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah atau manipulatif terhadap teks-teks agama.³⁰ Hal ini diperburuk dengan kurangnya kontrol terhadap kebenaran informasi di dunia digital, yang membuat masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara pesan yang sahih dan narasi yang dimanipulasi.

Dengan demikian, penggunaan media sosial, aplikasi berbagi pesan, dan situs web berbasis agama dalam politisasi hadis menunjukkan betapa besar pengaruh platform digital dalam membentuk pemahaman dan diskursus agama dalam konteks politik. Meskipun memberikan ruang untuk berbagi pengetahuan dan berdiskusi, keberadaan platform-platform ini juga membawa tantangan besar terkait dengan verifikasi informasi, manipulasi narasi, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pengelola platform untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan dan menerima informasi yang berkaitan dengan hadis, serta memastikan bahwa penafsiran yang disampaikan tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan politik semata.

Politisasi Hadis dalam Media

Politisasi hadis dalam media menjadi fenomena yang menarik dalam konteks sosial dan politik Islam modern. Media sebagai sarana komunikasi yang luas, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sering digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang memiliki tujuan tertentu, termasuk dalam kampanye politik.³¹ Salah satu bentuk dari politisasi ini adalah penggunaan hadis-hadis tertentu untuk mendukung posisi politik atau ideologi yang diinginkan oleh pihak tertentu. Dalam beberapa

²⁸ Oceania et al., "Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Alquran Dan Hadist."

²⁹ Istianah, "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial."

³⁰ Uswatun Hasanah, "Historical Approach in Understanding Hadith," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 10, no. 2 (2023): 37-51, <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>.

³¹ Ahmad Majdy Guntur, Andi Alimuddin Unde, and Hasrullah Hasrullah, "Media Mainstream Sebagai Sarana Komunikasi Politik," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 7307-10, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2853>.

kasus, politisasi hadis dilakukan dengan menekankan pesan moral atau ajaran yang terkandung dalam hadis, namun sering kali makna asli hadis tersebut diputarbalikkan atau dipilih secara selektif agar sesuai dengan agenda politik.³²

Sebagai contoh, dalam kampanye politik di Indonesia, beberapa politisi atau kelompok politik mungkin mengutip hadis yang berbicara tentang keadilan sosial atau perlindungan terhadap kaum dhuafa untuk mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan. Hadis seperti “Barangsiapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia bukan bagian dari umat Islam” (HR. Al-Tabrani)³³ bisa digunakan dalam konteks ini untuk menggugah rasa tanggung jawab sosial dan keadilan politik. Para politisi dapat memanipulasi pesan hadis ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat miskin, sehingga mereka layak mendapatkan dukungan masyarakat.

Namun, analisis terhadap penggunaan hadis dalam konteks ini perlu melihat lebih dalam mengenai makna dan interpretasi yang diberikan. Hadis tersebut berbicara tentang kepedulian terhadap sesama umat Islam, namun penerapannya dalam konteks kampanye politik bisa menimbulkan pertanyaan tentang niat dan kepentingan politis di balik pengutipan hadis tersebut. Dalam interpretasi yang lebih mendalam, hadis ini bukan hanya berbicara tentang kepedulian terhadap umat Islam, tetapi juga mengandung pesan universal tentang tanggung jawab sosial yang lebih luas, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama atau politik.³⁴ Oleh karena itu, penggunaan hadis ini dalam kampanye politik bisa dianggap manipulatif jika hanya ditujukan untuk meraih suara tanpa memperhatikan konteks dan pesan yang lebih mendalam dari hadis itu sendiri.

Contoh lainnya adalah ketika politisi mengutip hadis yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin, seperti hadis yang mengatakan, “Barangsiapa mentaati pemimpinku sungguh dia telah mentaatiku, barangsiapa bermaksiat kepada pemimpinku maka dia telah bermaksiat kepadaku” (HR. Muslim).³⁵ Dalam kampanye politik, hadis ini sering digunakan untuk menyerukan loyalitas dan kesetiaan kepada pemerintah atau pemimpin tertentu. Padahal, makna hadis ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang sesuai dengan ajaran agama dan keadilan, bukan ketaatan yang buta atau tanpa kritikan

³² Nugraha, Fatihunnada, and Huda, “Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik.”

³³ Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad Al-Ṭabrānī, *Al-Muʿjam Al-Ausaf*, vol. 7 (Kairo: Dār al-Haramain, 1995), no. 7473, 270.

³⁴ <https://alhabibomar.com/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86>

³⁵ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fuād ‘Abd Al-Bāqī, vol. 3 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), no. 1835, 1466.

terhadap kebijakan yang tidak adil.³⁶ Politisasi hadis ini dapat memicu ketidakadilan jika diterapkan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moral Islam yang menuntut adanya keadilan dan pemerintahan yang berlandaskan kebenaran.

Selain itu, politisasi hadis juga sering terjadi melalui selektivitas dalam memilih hadis yang sesuai dengan agenda politik tertentu. Misalnya, hadis yang berbicara tentang keutamaan berjihad bisa digunakan untuk mengajak orang bergabung dalam perjuangan politik tertentu dengan mengidentifikasi perjuangan mereka sebagai jihad. Hadis seperti “Sebaik-baik jihad adalah berbicara dengan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim” (HR. Tirmidzi) bisa diangkat dalam konteks perjuangan melawan pemerintah yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, hadis tersebut digunakan untuk membangun narasi bahwa perlawanan terhadap penguasa adalah bagian dari perjuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, interpretasi ini harus diperiksa lebih lanjut dengan melihat apakah tindakan perlawanan tersebut memang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kedamaian, keadilan, dan kebijaksanaan.

Politisasi hadis dalam media juga bisa berbahaya jika digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau intoleransi. Sebagai contoh, beberapa kelompok ekstremis mungkin mengutip hadis yang berbicara tentang jihad membela agama dengan cara kekerasan. Padahal, konteks hadis-hadis seperti ini perlu dilihat dengan sangat hati-hati, karena dalam banyak kasus, perjuangan yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut tidak mengarah pada kekerasan, melainkan pada perjuangan dalam menjaga kehormatan agama melalui cara-cara damai dan bijaksana.³⁷ Penggunaan hadis untuk membenarkan kekerasan atau intoleransi bisa sangat menyesatkan jika tidak memperhatikan konteks sejarah dan sosial yang mendasarinya.

Dengan demikian, politisasi hadis dalam media memiliki implikasi yang luas terhadap pemahaman umat Islam mengenai ajaran agama dan bagaimana agama dapat diterapkan dalam kehidupan politik. Politisasi ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna hadis dan konteks penggunaannya dalam politik, agar tidak terjadi manipulasi yang merugikan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi yang baik tentang hadis dan interpretasi yang tepat akan membantu mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik yang sempit dan merugikan.

Dampak Politisasi Hadis pada Masyarakat

Politisasi hadis, yang merujuk pada penggunaan teks-teks hadis untuk kepentingan politik tertentu, telah memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama serta memicu fragmentasi sosial yang cukup signifikan. Hadis, sebagai

³⁶ Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali et al., “The Concept of Al- Ta’ah (Obedience) To Muslim Leadership From The Islamic Political Thought,” *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2021): 263–80, <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.11947>.

³⁷ Sefriyono, Ilhamni, and Rahmi, “Hadis-Hadis Jihad: Dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 191–204, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.4662>.

sumber ajaran Islam yang diambil dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw., seharusnya berfungsi sebagai petunjuk moral dan etika yang universal.³⁸ Namun, ketika hadis dipolitisasi, interpretasinya sering kali disesuaikan dengan kepentingan kelompok atau individu yang berkuasa. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pemahaman masyarakat tentang hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan agama, berinteraksi dengan sesama, dan melihat dunia di sekitar mereka.

Pemahaman masyarakat tentang hadis yang berubah atau terganggu sering kali disebabkan oleh upaya untuk menjadikan hadis sebagai alat untuk mendukung kebijakan atau ideologi politik tertentu. Dalam banyak kasus, politisasi hadis dimaksudkan untuk memberikan legitimasi pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok politik tertentu. Misalnya, dalam sejarah politik Islam, terdapat upaya untuk memanipulasi hadis guna mendukung kebijakan-kebijakan yang otoriter atau untuk mempertahankan status quo sosial dan ekonomi. Hal ini mengarah pada penafsiran hadis yang sangat selektif, di mana teks-teks yang dianggap mendukung ideologi tertentu diprioritaskan, sementara teks yang bertentangan dengan kepentingan politik atau sosial dikesampingkan.³⁹

Konsekuensi dari perubahan pemahaman ini adalah munculnya pemahaman yang terdistorsi tentang ajaran Islam. Masyarakat yang terpengaruh oleh politisasi hadis cenderung melihat ajaran agama melalui lensa politik, bukan sebagai panduan moral yang universal. Misalnya, hadis-hadis yang seharusnya mengajarkan tentang keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan hak-hak individu dapat dimanipulasi untuk mendukung kebijakan yang menindas kelompok tertentu atau untuk memupuk ketidaksetaraan sosial. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat memperburuk ketegangan antar kelompok, di mana masing-masing kelompok merasa bahwa mereka adalah penerima wahyu yang sah, sementara kelompok lainnya dianggap sesat atau tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran yang benar.⁴⁰

Fragmentasi sosial merupakan dampak lain dari politisasi hadis yang tak kalah penting. Ketika hadis digunakan untuk memperkuat posisi politik atau untuk membenarkan kebijakan tertentu, masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki interpretasi agama yang berbeda. Fragmentasi ini sering kali memperburuk polarisasi sosial, yang terlihat dalam konflik antar kelompok agama, etnis, atau ideologis.⁴¹ Dalam banyak kasus, perbedaan penafsiran

³⁸ Maulana Hasan Hasibuan, Alwi Padly Harahap, and Aurora Hanifah, "The Role of The Prophet in Educating Children and Its Implementation in Preventing Gadget Addiction in Children," *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2024): 309–30, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11159>.

³⁹ Makrum Makrum, "Hadits-Hadits Politik Abad Pertengahan Islam (Suatu Kajian Sosiologis)," *Religia* 12, no. 2 (2017): 14, <https://doi.org/10.28918/RELIGIA.V12I2.192>.

⁴⁰ Norsaleha Mohd Salleh et al., "Penyalahgunaan Living Hadis Dalam Kalangan Kelompok Liberal: Satu Sorotan Literatur Secara Sistematis," in *E-Proceeding of 3rd INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith (IMAM 2018)*, 2018, 96–106.

⁴¹ Syawqi and Umam, "Nuansa Politik Dalam Memahami Hadis: Analisa Metodologis-Historis."

terhadap hadis menjadi titik tolak perbedaan yang lebih luas dalam pandangan politik dan sosial, yang pada akhirnya memecah belah masyarakat.⁴²

Selain itu, fragmentasi sosial juga terjadi karena adanya klaim kebenaran yang eksklusif. Kelompok-kelompok yang merasa memiliki pemahaman yang lebih otoritatif terhadap hadis, karena telah dikaitkan dengan pihak yang berkuasa, sering kali menolak interpretasi dari kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka.⁴³ Ini menciptakan suasana ketegangan yang meluas, di mana setiap kelompok merasa bahwa mereka adalah satu-satunya yang mengikuti ajaran yang benar. Politisasi hadis dengan demikian berkontribusi pada terjadinya disintegrasi sosial, karena masyarakat yang seharusnya bersatu dalam kesamaan ajaran agama malah terpecah dalam berbagai fraksi yang saling berhadapan.

Fragmentasi sosial ini juga dapat memperburuk hubungan antaragama. Ketika hadis-hadis yang dipolitisasi digunakan untuk membenarkan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok agama atau etnis tertentu, hal ini memperburuk ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Politisasi hadis dapat membuat dialog antaragama menjadi lebih sulit, karena masing-masing pihak merasa bahwa mereka memiliki interpretasi agama yang lebih sah dan benar. Ketegangan ini dapat mengarah pada radikalisme, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terancam oleh keberadaan kelompok lain dan mencoba mempertahankan dominasi mereka atas nama agama.⁴⁴

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, politisasi hadis juga semakin mudah tersebar, memperburuk dampak fragmentasi sosial. Media sosial, misalnya, telah menjadi saluran utama untuk menyebarkan interpretasi hadis yang dipolitisasi. Dengan cepat, pesan-pesan yang mengarah pada pemahaman yang sempit dan eksklusif dapat tersebar luas, memperparah polarisasi dalam masyarakat. Ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakpercayaan dan kebencian semakin menguat, sementara upaya untuk membangun pemahaman bersama dan persatuan menjadi semakin sulit.

Dengan demikian, politisasi hadis membawa dampak yang sangat besar terhadap pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, serta menyebabkan fragmentasi sosial yang mengancam keharmonisan masyarakat. Ketika hadis digunakan sebagai alat politik, ia kehilangan makna spiritual dan moralnya yang seharusnya menyatukan umat, dan justru memperburuk perpecahan sosial dan ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk kembali kepada pemahaman hadis yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, serta memperjuangkan dialog antar kelompok yang lebih inklusif untuk mengurangi dampak negatif dari politisasi teks agama.

⁴² Nadia Zunly Nadia, "Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam NU Dan Salafi Wahabi Di Indonesia)," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2017): 141-77, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1327>.

⁴³ Rizqa Ahmadi, "Kontestasi Atas Otoritas Teks Suci Islam Di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis Melalui Media Baru," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 22-35, <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1138>.

⁴⁴ Shofan, "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis?"

Solusi untuk Menangani Politisasi Hadis

Politisasi hadis menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga kesucian dan keautentikan ajaran Islam di era digital ini. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak pihak yang mencoba memanfaatkan hadis untuk tujuan politik atau agenda tertentu, yang sering kali menyimpang dari makna asli hadis tersebut. Untuk menangani masalah ini, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil, yang melibatkan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, penguatan regulasi terkait penyebaran konten agama di media digital, peran ulama dan tokoh agama dalam meluruskan narasi yang menyimpang, serta kampanye media yang mendukung pemahaman hadis yang kontekstual dan autentik.

Pertama, literasi digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi langkah penting dalam mengedukasi umat Islam, terutama generasi muda, agar mereka mampu memilah informasi yang benar dan otentik dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Literasi digital yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam akan mengajarkan umat untuk tidak sembarangan mengakses dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan agama.⁴⁵ Dalam hal ini, nilai-nilai Islam seperti kehati-hatian, kejujuran, dan keadilan sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia maya. Literasi digital juga mencakup keterampilan untuk memverifikasi sumber informasi, mengenali hoaks, dan memahami konteks hadis yang sebenarnya, sehingga narasi yang disebarkan melalui media digital tidak terdistorsi atau dipolitisasi.⁴⁶ Melalui pemahaman yang mendalam tentang hadis dan prinsip-prinsip Islam, umat bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya.

Kedua, penguatan regulasi terkait penyebaran konten agama di media digital juga merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi polarisasi dan politisasi hadis. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mengatur penyebaran informasi terkait agama di dunia maya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang otentik dan tidak dipergunakan untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu. Regulasi ini harus mampu melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun tetap menjamin bahwa konten yang beredar tidak merusak pemahaman agama atau menyebarkan ajaran yang salah.⁴⁷ Salah satu cara untuk menguatkan regulasi ini adalah dengan mengembangkan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap konten yang beredar, terutama yang berhubungan dengan agama, sehingga dapat memastikan bahwa hanya konten yang autentik dan sahih yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu, peran ulama dan tokoh agama dalam meluruskan narasi yang menyimpang sangatlah penting. Ulama memiliki tanggung jawab besar dalam

⁴⁵ Syahrizal Siregar, Ruki Rizal, and Indera Indera, "Literasi Digital : Peningkatan Pemahaman Dan Edukasi Kepada Generasi Millennial Di SMK Islam Adiluwih," *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 96–101, <https://doi.org/10.32877/nr.v3i1.1026>.

⁴⁶ Naimatus Tsaniyah and Kannisa Ayu Juliana, "Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks Di Era Disrupsi," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 121–40, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.

⁴⁷ Juju Saepudin, "Optimalisasi Peran Majelis Taklim Dalam Membumikan Moderasi Beragama," *Journal of Religious Policy* 1, no. 1 (2023): 23–29, <https://doi.org/10.31330/repo.viii.5>.

menjaga keotentikan ajaran Islam, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Mereka harus aktif dalam memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap hadis-hadis yang dipolitisasi atau dipelintir oleh oknum tertentu. Melalui khutbah, ceramah, tulisan, dan media sosial, ulama dapat mengedukasi umat mengenai pentingnya memahami hadis secara kontekstual dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Selain itu, tokoh agama juga harus berperan dalam menciptakan dialog yang terbuka dan inklusif, di mana berbagai pandangan dapat didiskusikan secara sehat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Dengan cara ini, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan benar tentang ajaran agama, serta terhindar dari pemahaman yang keliru atau manipulatif.

Terakhir, kampanye media yang mendukung pemahaman hadis yang kontekstual dan autentik harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Media massa, terutama media digital, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi.⁴⁸ Oleh karena itu, kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang cara memahami hadis secara benar harus digencarkan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai platform digital, termasuk situs web, media sosial, podcast, dan video online. Dalam kampanye ini, penting untuk menyajikan hadis-hadis dengan penjelasan yang ilmiah, mengaitkan konteks sosial dan sejarahnya, serta menunjukkan relevansi ajaran tersebut dalam kehidupan modern. Kampanye ini juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama yang kredibel, para ahli hadis, dan akademisi Islam yang dapat memberikan wawasan yang mendalam dan objektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga mampu memahami hadis dalam perspektif yang lebih luas, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan hadis untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, menangani polarisasi dan politisasi hadis memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, penguatan regulasi terkait penyebaran konten agama di media digital, peran aktif ulama, serta kampanye media yang mendukung pemahaman hadis yang kontekstual dan autentik, merupakan langkah-langkah yang sangat efektif dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan melawan politisasi yang merusak. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam mengakses dan menyebarkan informasi agama, serta dapat memahami hadis dengan lebih benar dan sesuai dengan konteksnya.

KESIMPULAN

Politisasi hadis dalam media menunjukkan bahwa penggunaan agama, khususnya hadis, sebagai instrumen kampanye politik memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa sejumlah kelompok politik cenderung memanipulasi hadis

⁴⁸ Ahmad Aridho et al., "Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 206–10, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>.

untuk memperkuat legitimasi ideologi dan kebijakan mereka, dengan cara mengutip hadis yang sejalan dengan tujuan politik mereka. Praktik ini sering kali mengabaikan konteks historis dan interpretasi yang lebih luas, sehingga dapat menciptakan distorsi pemahaman agama di kalangan masyarakat. Media, sebagai sarana penyebaran informasi, berperan besar dalam menyebarkan narasi-narasi ini, baik melalui teks, gambar, maupun video, yang sering kali diproduksi dengan tujuan untuk memobilisasi dukungan politik. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, agar dapat membedakan antara ajaran agama yang autentik dan politisasi agama yang berpotensi merusak pemahaman yang sah. Saran dari penelitian ini adalah perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai etika penggunaan agama dalam media, serta penguatan peran ulama dan cendekiawan Islam untuk memberikan klarifikasi yang benar terkait penggunaan hadis dalam konteks politik.

DATAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rizqa. "Kontestasi Atas Otoritas Teks Suci Islam Di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis Melalui Media Baru." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 22–35. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1138>.
- Ahmadvand, Fatemeh, Alireza Ashtari Tafreshi, and Ahmad Rabbanikhah. "The Position of Qur'an and Hadith in Islamic Political Thought: The Case Study of Siraj Al-Muluk by Abubakr Al-Turtushi (D. 520 AH)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (2022): 215. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3395>.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam Al-Ausāṭ*. Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1995.
- Ali, Wan Zailan Kamaruddin Wan, Ahmad Zuhdi Ismail, Mohd Solahuddin Shahrudin, and Asep Sahid Gatara. "The Concept of Al- Ta'ah (Obedience) To Muslim Leadership From The Islamic Political Thought." *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2021): 263–80. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.11947>.
- Alkadri, Alkadri. "Propaganda Politik Dalam Isi Kandungan Hadis-Hadis Palsu." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 68–85. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i1.768>.
- Andi, Azhari. "Menyikapi Fenomena Labelling Olok-Olok Politik Di Media Sosial Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (2019): 207–33. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1624>.
- Angretnowati, Yuseptia, and Meike Lusye Karolus. "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 369–93. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>.
- Aridho, Ahmad, Ture Ayu Situmeang, Dewi Romantika Tinambunan, Kania Nova Ramadhani, Murni Wati Lase, and Julia Ivanna. "Peran Media Massa Dalam

- Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 206–10. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>.
- Arifin, Indar. "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres, Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022): 1049. <https://doi.org/10.29210/o20221706>.
- Aupers, Stef, and Lars de Wildt. "Digital Religion." Edited by Deana A Rohlinger and Sarah Sobieraj. *The Oxford Handbook of Digital Media Sociology*. Oxford University Press, September 21, 2022. <https://doi.org/10.1093/oxfordhob/9780197510636.013.37>.
- Bolong, Bertolomes. "Etika Politik Ulama." *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018): 129–52. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art7>.
- Guntur, Ahmad Majdy, Andi Alimuddin Unde, and Hasrullah Hasrullah. "Media Mainstream Sebagai Sarana Komunikasi Politik." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 7307–10. <https://doi.org/10.54371/jlIP.v6i9.2853>.
- Hasanah, Uswatun. "Historical Approach in Understanding Hadith." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 10, no. 2 (2023): 37–51. <https://doi.org/10.1113/umran2023.10n2.598>.
- Hasfi, Nurul. "Politik Keshalehan Personal Dalam Pemilihan Presiden 2014 Dalam Media Sosial Twitter." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 48. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28580>.
- Hasibuan, Maulana Hasan, Alwi Padly Harahap, and Aurora Hanifah. "The Role of The Prophet in Educating Children and Its Implementation in Preventing Gadget Addiction in Children." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2024): 309–30. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11159>.
- Imron, Ali. "THE MILLENIAL GENERATION, HADITH MEMES, AND IDENTITY POLITICS: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 255–83. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5675>.
- Istianah, Istianah. "Era Disrupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hadis Di Media Sosial." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2020. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6861>.
- Kalganov, Mykhailo. "The Interaction of Humans and The Information Sphere in The Digital Age." *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy* 1, no. 8 SE- (March 29, 2023): 25–29. <https://doi.org/10.17721/2523-4064.2023/8-4/8>.
- Karim, Syahrir. "The Phenomenon of WhatsApp Group and The Formation of a New Political Identity." In *HICOSPOS*, 1–5, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291590>.
- Makrum, Makrum. "Hadits-Hadits Politik Abad Pertengahan Islam (Suatu Kajian Sosiologis)." *Religia* 12, no. 2 (2017): 14. <https://doi.org/10.28918/RELIGIA.V12I2.192>.
- Muyassaroh, Inas Sany, Unggul Sugi Harto, Diryo Suparto, Didi Permadi, and Sri Sutjiatmi. "Model Komunikasi Pendakwah Pada Konten Dakwah Dalam Isu Sosial Dan Politik Di Media Sosial." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9,

- no. 4 (2024): 2231–41. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15480>.
- Nadia, Nadia Zunly. “Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam NU Dan Salafi Wahabi Di Indonesia).” *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2017): 141–77. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1327>.
- Nugraha, Mugy, Fatihunnada Fatihunnada, and Nalil Huda. “Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 63. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.8982>.
- Oceania, Siti Annisafa, Firman Robiansyah, Muhammad Alfalah, and Vazar Yoga Danuarta. “Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Alquran Dan Hadist.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2024): 131–52. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2753>.
- Qurtuby, Sumanto Al. “Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia.” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.
- Ridho, Ali, Aidillah Suja, Akhmad Rifa’i, and Muhammed Sharin Haji Masri. “Reducing The Politicization of Religion and Discrimination Againsts Minority Groups Ahead of The 2024 Political Year in Indonesia From The Perspective of Digital Media.” *PERADA* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.825>.
- Rosyad, Sabilar, and Muhammad Alif. “Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (2023): 185–97. <https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>.
- Saepudin, Juju. “Optimalisasi Peran Majelis Taklim Dalam Membumikan Moderasi Beragama.” *Journal of Religious Policy* 1, no. 1 (2023): 23–29. <https://doi.org/10.31330/repo.viii.5>.
- Salleh, Norsaleha Mohd, Lilly Suzana, Hj Shamsu, Rosni Wazir, and Abur Hamdi. “Penyalahgunaan Living Hadis Dalam Kalangan Kelompok Liberal : Satu Sorotan Literatur Secara Sistematis.” In *E-Proceeding of 3rd INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith (IMAM 2018)*, 96–106, 2018.
- Salman, Abdul Matin Bin. “Hadith of the Prophet in the Politics of Power: Study of the Meaning of the Prophet’s Hadith from the Perspective of Power.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 2580–3190. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4326>.
- Sefriyono, Ilhamni, and Rahmi. “Hadis-Hadis Jihad: Dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 191–204. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.4662>.
- Shofan, Mohammad. “Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis ?” *MAARIF* 13, no. 2 (2018): 3–6. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.17>.
- Siregar, Syahrizal, Ruki Rizal, and Indera Indera. “Literasi Digital : Peningkatan Pemahaman Dan Edukasi Kepada Generasi Millennial Di SMK Islam Adiluwih.” *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 96–101. <https://doi.org/10.32877/nr.v3i1.1026>.
- Syawqi, Abdul Haq, and Muhammad Khatibul Umam. “Nuansa Politik Dalam Memahami Hadis: Analisa Metodologis-Historis.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (2021): 201–20. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9421>.
- Tsaniyah, Naimatus, and Kannisa Ayu Juliana. “Literasi Digital Sebagai Upaya

Menangkal Hoaks Di Era Disrupsi.” *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 121–40. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.